



FEBUNMUL

Analisis rasio keuangan daerah pada kabupaten kutai kartanegara

Evi Oktaviani¹, Dwi Risma Deviyanti^{2*}, Salmah Pattisahusiwa³
¹²³ Universitas Mulawarman. Jalan Tanah Grogot No.1, Samarinda

Email: dwi.risma.deviyanti@feb.unmul.ac.id*

Article History

Received: 2021-07-28

Accepted: 2022-04-29

DOI:

Copyright@year
owned by Author(s).
Published by JIAM.

ABSTRAK

Jenis Data yang digunakan yaitu data deskriptif kuantitatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal dikatakan sangat kurang baik, rasio ketergantungan keuangan daerah dikatakan sangat tinggi terhadap pemerintah pusat, rasio kemandirian daerah dikatakan kurang, rasio efektivitas PAD dikatakan sangat efektif, rasio efisiensi keuangan daerah dikatakan efisien, rasio pertumbuhan terhadap pendapatan dan belanja dikatakan baik walaupun sempat mengalami pertumbuhan tidak baik di tahun-tahun sebelumnya, rasio keserasian keuangan daerah menunjukkan dana belanja yang dialokasikan pemerintah daerah untuk belanja modal masih rendah dibandingkan dengan belanja operasi.

Kata kunci: Rasio Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Keserasian.

ABSTRACT

The type of data used is descriptive quantitative data using secondary data sources. The analytical tool used in this study is the regional financial performance ratio. The results of this study indicate that the calculation of the degree of fiscal decentralization ratio is said to be very poor, the regional financial dependence ratio is said to be very high on the central government, the regional independence ratio is said to be lacking, the PAD effectiveness ratio is said to be very effective, the regional financial efficiency ratio is said to be efficient, the growth ratio to revenues and expenditures are said to be good although they experienced poor growth in previous years, the regional financial compatibility ratio shows that the expenditure funds allocated by regional governments for capital expenditures are still low compared to operating expenditures.

Key words: *Regional Financial Performance Ratio, Fiscal Decentralization Degree Ratio, Dependency Ratio, Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Growth Ratio and Harmony Ratio.*

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah yang baik tercermin dari kemampuan daerah dalam mengelola keuangan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini mencerminkan sejauh mana kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan kegiatan di daerahnya, yang kemudian dinilai untuk menentukan posisi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sendiri.

Pengukuran keuangan daerah sangat penting dilakukan untuk menilai tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang diukur melalui beberapa rasio keuangan daerah yaitu Derajat Desentralisasi Fiskal untuk melihat tingkat kepercayaan pemerintah pusat terhadap daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah untuk mengukur tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana yang dialokasikan pemerintah pusat, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah untuk melihat tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sendiri, Rasio Efektivitas PAD untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD dari anggaran yang ada, Rasio Efisiensi untuk membandingkan besaran penerimaan daerah atau pengeluaran daerah, Rasio Pertumbuhan untuk melihat keberhasilan pemerintah daerah dalam mempertahankan atau meningkatkan hasil pencapaian yang diperoleh daerah, Rasio Keserasian untuk melihat tingkat alokasi dana belanja untuk belanja oprasi dan belanja modal pada pelaksanaan APBD. Penilaian kinerja keuangan juga semakin dibutuhkan karena meningkatnya tuntutan pemangku kepentingan terhadap kinerja pemerintah dan penilaian kinerja dan manajemen daerah diperlukan untuk memotivasi pemerintah meningkatkan kinerjanya di tahun berikutnya. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi yang nyata tentang keuangan suatu periode tertentu, sehingga menggunakan cara yang sederhana agar laporan lebih mudah dibaca.

Kabupaten Kutai Kartanegara adalah kabupaten yang berada pada Provinsi Kalimantan Timur yang kaya akan sumber daya alam (SDA) yang merupakan satu kebutuhan pokok untuk mewujudkan kegiatan pemerintahan yang bekerja untuk kebaikan masyarakat. PAD juga merupakan faktor penting dalam kegiatan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berlandaskan pada peraturan yang berlaku. Berdasarkan pelaksanaan APBD tahun 2016-2019 keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami fluktuasi pada Pendapatan Asli Daerah, sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana kinerja pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan judul "Analisis Rasio Keuangan Daerah pada Kabupaten Kutai Kartanegara". Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten Kutai Kaertanegara? Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan daerah pada Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. METODE

Definisi Operasional

Adapun beberapa definisi operasional yang perlu diketahui yaitu sebagai berikut :

1. APBD adalah perencanaan keuangan dalam satu tahun berdasarkan peraturan pemerintah.
2. Pendapatan daerah merupakan keseluruhan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari semua aktivitas pemerintah daerah.
3. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah untuk mendanai aktivitas pemerintah dalam periode yang bersangkutan.
4. PAD merupakan hasil perolehan dari sumber-sumber di daerah.
5. Pajak daerah adalah pungutan wajib dari perseorangan atau lembaga yang telah diatur oleh pemerintah dengan peraturan yang berlaku.
6. Retribusi daerah adalah suatu pungutan biaya perseorangan atau lembaga untuk jasa atau perizinan tertentu diberikan dan / atau dikeluarkan pemerintah daerah.

7. Total Pendapatan Daerah adalah keseluruhan penerimaan yang diterima pemerintah daerah.
8. Pembiayaan merupakan penghasilan yang harus dibayar kembali atau biaya-biaya yang dibayar kembali pada tahun buku berikutnya.
9. Belanja modal merupakan biaya rumah tangga pemerintah untuk memperoleh aset tetap dan aset lain yang memberikan jasa lebih dari satu (satu) periode tagihan.
10. Belanja operasional adalah biaya rumah tangga dalam mendanai aktivitas daerah dengan umur ekonomis kurang dari satu tahun

Jangkauan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara yang terletak di Jalan Wolter Mongonsidi, Kelurahan. Timbau, Kec. Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan memperoleh data melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Kartanegara dan menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio pertumbuhan dan rasio keserasian sebagai tolak ukur.

Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif.
2. Sumber data yang dipakai adalah data sekunder.
3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016 & 2019

Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur kinerja keuangan daerah adalah:

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio ini untuk melihat tingkat kepercayaan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan di daerah rasio ini menunjukkan kontribusi PAD terhadap pendapatan dimana semakin besar kontribusi PAD maka semakin besar kemampuan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$DDF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria yang menjadi tolak ukur derajat desentralisasi fiskal, seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal

Skala Ordinal	Kriteria
Lebih dari 90%	Sangat Baik
81% -90%	Baik
61%-80%	Cukup Baik
Kurang dari 60%	Kurang Baik

Sumber: Banga (2017)

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ini digunakan untuk melihat kondisi suatu pemerintah dalam ketergantungannya terhadap dana yang dialokasikan pemerintah pusat.

Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menilai ketergantungan daerah seperti pada tabel berikut:

Tabel 2. Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Presentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
0,00-10,00	Sangat Rendah
10,01-20,00	Rendah
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber : Banga (2017)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini untuk melihat seberapa tingkat kemampuan daerah dalam mendanai kegiatan pemerintahannya sendiri, semakin tinggi presentase rasio, maka semakin tinggi tingkat kemandirian.

Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Trf Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Kriteria dalam menilai kemandirian daerah seperti pada tabel berikut:

Tabel 3. Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Presentase %	Kriteria
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : Permendagri Nomor 37 Tahun 2014

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio ini digunakan untuk melihat tingkat kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Kriteria dalam menilai rasio efektivitas pendapatan asli daerah seperti pada tabel berikut:

Tabel 4. Kriteria Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Presentase (%)	Kategori
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2016)

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan antara besaran penerimaan pemerintah daerah terhadap besaran pengeluaran pemerintah daerah. Dimana bila nilai rasio efisiensi semakin kecil maka semakin baik kinerja pemerintah.

Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Pealisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria dalam menilai rasio efisiensi keuangan daerah seperti pada tabel berikut:

Tabel 5. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah

Presentase Efisiensi kinerja %	Kriteria
>100%	Tidak Efisien
100%	Efisiensi Berimbang
<100%	Efisien

Sumber: Mahsun (2012)

Rasio Pertumbuhan

Rasio ini digunakan untuk melihat keberhasilan pemerintah daerah mempertahankan atau meningkatkan hasil dari pencapaian di peroleh dari tahun ke tahun.

Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Pendapatan / Belanja Tn} - \text{Pendapatan / Belanja To}}{\text{Pendapatan / Belanja To}} \times 100\%$$

Rasio Keserasian

Rasio ini digunakan untuk melihat bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan dananya untuk mendanai belanja operasi dan belanja modal secara optimal.

Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi /Modal} = \frac{\text{Total Belanja Operasi /Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tujuan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah pada Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun hasil dari analisis rasio kinerja keuangan daerah tersebut adalah:

Tabel 6. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2019

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Total Pendapatan (Rp)	Presentase Rasio (%)	Kriteria
2016	267,214,032,301,77	4,130,498,976,422,77	6,47	Kurang Baik
2017	435,513,161,873,75	3,402,599,166,648,75	12,80	Kurang Baik
2018	303,927,837,102,38	4,056,073,917,135,93	7,50	Kurang Baik
2019	552,433,123,136,41	5,745,271,078,058,41	9,61	Kurang Baik
Rata-rata			9,09	Kurang Baik

Sumber data: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara yang diolah(2021)

Dari hasil persentase menunjukkan bahwa persentase tingkat pelaksanaan pembangunan daerah masih kurang baik, dari faktor PAD yang masih rendah yang

disebabkan oleh menurunnya pendapatan retribusi daerah di tahun 2017 sebesar Rp 7.285.493.644,16 dan menurunnya pendapatan pajak daerah sebesar Rp 60.773.205.467,70, pendapatan retribusi daerah sebesar Rp 6.392.226.211,36, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 34.045.810.871,75, lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 207.716.594.551,57 di tahun 2018 yang cukup besar yang mengakibatkan tingkat kekuasaan dan tugas pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi masih kurang baik

Tabel 7. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2019

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Pendapatan (Rp)	Rasio (%)	Kriteria
2016	3,863,284,944,121,00	4,130,498,976,422,77	93,53	Sangat Tinggi
2017	2,940,379,024,775,00	3,402,599,166,648,75	86,41	Sangat Tinggi
2018	3,660,941,790,075,00	4,056,073,917,135,39	90,25	Sangat Tinggi
2019	5,093,805,634,922,00	5,745,271,087,058,41	88,66	Sangat Tinggi
Rata-rata			89,71	Sangat Tinggi

Sumber data: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara yang diolah(2021)

Berdasarkan perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan bahwa persentase ketergantungan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara berfluktuasi dari tahun 2016 hingga 2019 dengan rata-rata 89,71% dimana pada tahun 2016 rasio ketergantungan daerah sebesar 93,53% di tahun 2017 rasio ketergantungan menurun menjadi 86,41%, pada tahun 2018 rasio ketergantungan daerah meningkat lagi sebesar 90,25%, serta tahun 2019 kembali menurun sebesar 88,66% sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendapatan transfer masih sangat tinggi.

Tabel 8. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2019

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio (%)	Kriteria
2016	267,214,032,301.77	3,863,284,944,121,00	6,92	Sangat Kurang
2017	435,513,161,873.75	2,940,379,024,775,00	14,81	Kurang
2018	303,927,837,102.38	3,660,941,790,075,00	8,30	Sangat Kurang
2019	552,433,123,136,41	5,093,805,634,922,00	10,84	Kurang
Rata-rata			10,22	Kurang

Sumber data: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara yang diolah(2021)

Berdasarkan perhitungan menunjukkan bahwa persentase kemandirian daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara berfluktuasi antara tahun 2016 dan 2019 dengan rata-rata 10,22%. Dimana tahun 2016 perhitungan rasio sebesar 6,92% kemudian menurut perhitungan hasil pada tahun 2017 tingkat kemandirian daerah meningkat menjadi 14,81%, pada tahun 2018 kembali menurun sebesar 830%, di tahun 2019 meningkat sebesar 10,84% sehingga cenderung dikatakan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai pelaksanaan kegiatannya sendiri masih rendah.

Tabel 9. Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2019

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	Rasio (%)	Kriteria
2016	267,214,032,301.77	285,087,168,680,82	93,73	Cukup Efektif
2017	435,513,161,873.75	453,397,588,009,56	96,05	Cukup Efektif
2018	303,927,837,102.38	351,773,706,477,11	86,40	Kurang Efektif
2019	552,433,123,136,41	391,645,109,320,43	141,05	Sangat Efektif
Rata-rata			104,31	Sangat Efektif

Sumber Data: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara yang diolah (2021)

Berdasarkan hasil analisis efektivitas PAD menunjukkan bahwa persentase PAD di Kabupaten Kutai Kartanegara berfluktuasi antara tahun 2016 sampai tahun 2019 dengan rata-rata 104,31% dimana 2016 sebesar 93,73%, hasil perhitungan efektivitas pada 2017 meningkat menjadi 96,05% kemudian pada tahun 2018 menurun lagi sebesar 86,40% dan meningkat di tahun 2019 sebesar 141,31%, sehingga dikatakan bahwa kapasitas pemerintah dalam mencapai target yang ditetapkan Sangat efektif.

Tabel 10. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio (%)	Kriteria
2016	3,617,654,390,898,25	4,130,498,976,422,77	87,58	Efisien
2017	3,559,088,801,513,00	3,402,599,166,648,75	104,60	Tidak Efisien
2018	3,272,002,980,594,85	4,056,073,917,135,39	80,67	Efisien
2019	4,124,401,285,312,46	5,745,271,078,058,41	71,79	Efisien
Rata-rata			86,16	Efisien

Sumber Data: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara yang diolah (2021)

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2016 hingga 2019 persentase perhitungan rasio tersebut berfluktuasi dengan persentase rata-rata 86,16% dimana tahun 2016 persentase sebesar 87,58%, pada tahun 2017 persentase rasio meningkat 104,60%, kemudian pada 2018 kembali menurun 80,67%, dan di tahun 2019 sebesar 71,79%, sehingga dapat dikatakan efisien.

Tabel 11. Rasio Pertumbuhan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2019

Tahun	Pendapatan Daerah (Rp)	Pendapatan Tn - Pendapatan To (Rp)	Rasio Pendapatan (%)
2016	4,130,498,976,422,77	4,130,498,976,422,77	-
2017	3,402,599,166,648,75	-1,676,936,041,484,14	33,01
2018	4,056,073,917,135,39	653,474,750,486,64	19,20
2019	5,745,271,078,058,41	1,689,197,160,923,02	41,64
Rata-rata			31,28

Sumber Data: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara yang diolah (2021)

Pada perhitungan pertumbuhan keuangan daerah terlihat bahwa terjadi naik turunnya persentase pertumbuhan pendapatan daerah dari tahun 2016 sampai tahun 2019 dimana rata-rata persentase tingkat pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 31,28%. Pertumbuhan tersebut dapat dikatakan sebagai pertumbuhan yang baik.

Tabel 12. Rasio Pertumbuhan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2019

Tahun	Belanja Daerah (Rp)	Belanja Tn - Belanja To (Rp)	Rasio Belanja (%)
2016	3,617,654,390,898,25	3,617,654,390,898,25	-
2017	3,559,088,801,513,00	-58,565,589,385,25	-1,62
2018	3,272,002,980,594,85	-286,485,820,918,15	-8,05
2019	4,124,401,285,312,46	851,798,308,717,61	26,03
Rata-rata			5,45

Sumber Data: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara yang diolah (2021)

Berdasarkan perhitungan pertumbuhan belanja dari tahun 2016 hingga 2019 juga dinilai baik meskipun mengalami pertumbuhan yang tidak baik di tahun 2017 dan 2018.

Tabel 13. Rasio Keserasian Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2019

Tahun	Belanja Daerah (Rp)	Belanja Operasi (Rp)	Rasio (%)	Belanja Modal (Rp)	Rasio (%)
2016	3.617.654.390.898,25	3.017.983.737.078,25	83,42	598.722.429.709,00	16,55
2017	3.559.088.801.513,00	3.088.290.716.821,00	84,52	548.024.205.422,00	15,40
2018	3.272.002.980.594,85	2.678.233.919.219,77	81,79	593.769.061.375,00	18,15
2019	4.124.401.285.312,46	2.973.036.431.960,79	72,08	1.151.293.775.001,67	27,91
Rata-rata			80,45		19,50

Sumber Data :BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara yang diolah (2021)

Berdasarkan hasil perhitungan analisis belanja operasional tahun 2016 hingga 2019 dapat dikatakan cukup baik dengan persentase penurunan rasio setiap tahun dengan rata-rata 80,45%, dan hasil penghitungan belanja modal tahun 2016 terhadap 2019 tergolong baik dengan rata-rata 19,50%, meskipun demikian daerah masih menggunakan lebih sedikit dana untuk kegiatan belanja modal dari pada belanja operasional.

D. SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan dari perhitungan rasio desentralisasi fiskal di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2019 menunjukkan bahwa batasan daerah untuk pelaksanaan desentralisasi fiskal masih kurang baik karena masih rendahnya kontribusi PAD pada pendapatan daerah.
2. Pada rasio ketergantungan pemerintah daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2019 menunjukkan ketergantungan daerah pada pusat masih tinggi dalam pembiayaan kegiatan pemerintah daerah yang disebabkan oleh masih rendahnya PAD
3. Berdasarkan hasil analisis kemandirian daerah ditahun 2016-2019 terlihat bahwa angka presentase untuk melaksanakan pengelolaan daerah sendiri masih kurang baik, dimana tingkat pemasukan dari pendapatan transfer masih tinggi dibandingkan PAD sendiri.
4. Berdasarkan hasil efektivitas PAD di tahun 2016-2019 menunjukkan bahwa tingkat efektivitas PAD sangat efektif dimana pencapaian pemerintah dalam pelaksanaan PAD sudah mendekati, dan melampaui anggaran yang ada.
5. Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2019 menunjukkan efisien dimana pemerintah daerah dapat menyesuaikan pendapatan dan pengeluarannya.
6. Pada analisis pertumbuhan keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2019 menggambarkan peningkatan pertumbuhan daerah dinilai baik meskipun sempat mengalami pertumbuhan belanja yang negatif pada tahun-tahun sebelumnya.
7. Berdasarkan perhitungan rasio keserasian di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2019 terlihat baik, meskipun demikian alokasi dana belanja untuk biaya operasional masih tinggi dibandingkan belanja modal.

Saran

1. Pemerintah daerah harus menambah dan meningkatkan sumber daya yang ada dengan memperluas aset yang ada, sehingga Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat dalam perekonomian di daerah
2. Pemerintah daerah perlu berani dalam menggunakan dana belanja untuk keperluan belanja modal demi kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Banga, Wempy, 2017, *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Faud, Muhammad, Ramli, 2016, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Halim Abdul, Konsufi Muhammd Syam. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi 4). Salemba Empat, Jakarta.
- <https://kukarkab.bps.go.id/>
- Juliani Dora. (2017) "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014". *Skripsi FE UNSAD Yogyakarta*.
- Kaunang, C. E., & Naukoko, A. T. (2016). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah: Studi Pada Kota Manado (Tahun 2010-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*.
- Machmud, M., Kawung, G., & Rompas, W. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* Edisi Ketiga, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Pramita Puput. (2015). "Analisis Rasio untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013". *Skripsi FE Universitas Negeri Yogyakarta*
- Pranomo, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). (Joko Pramono). *Jurnal Ilmiah Among Makarti*.
- Pramita Puput. (2015). "Analisis Rasio untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013". *Skripsi FE Universitas Negeri Yogyakarta*
- Ramli Faud. (2015). *Pengantar Keuangan Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sijabat, Mentari Yosephen, Choirul Shaleh dan Abdul Wachid. (2013). "Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah". *Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol.2 No.2*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.